



4.000 Titik LPJ Sudah Pakai Meteran

TABANAN, NusaBali

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tabanan hingga akhir Oktober 2015 telah pasang 4.000 titik lampu penerangan jalan (LPJ) lengkap dengan meteran. Dinas PU punya tanggungjawab pasang 10.000 titik LPJ. Nantinya, seluruh LPJ akan dilengkapi meteran.

Kepala Dinas PU Tabanan, Gusti Ngurah Anom Anthara mengakui dari 10.000 titik LPJ yang sudah terpasang, dipastikan ada yang tak berfungsi. Namun, PU mengaku bisa gerak cepat mengatasi permasalahan tersebut setelah memiliki peralatan sky light. "Jadi bisa diperbaiki dengan segera jika ada laporan kerusakan pada lampu penerangan," ungkap Anom Anthara, Minggu (22/11). Ditambahkan, dalam pemeliharaan fasilitas penerangan jalan, setahun Dinas PU Tabanan mendapatkan anggaran Rp 1 miliar.

Anom Anthara menyebutkan, selain program meterisasi, Pemkab Tabanan berencana menyeragamkan lampu dan warna tiangnya. "Kami masih mengkaji mengenai jenis maupun warna yang hendak dipakai. Nantinya fasilitas penerangan di Tabanan seragam," tandasnya. Selain 10.000 titik LPJ di jalan protokol, masih ada titik-titik lampu yang ada di Tabanan terutama di perdesaan maupun masuk gang perumahan. Hanya saja, LPJ yang masuk gang, Dinas PU tak punya tanggungjawab pemeliharaan. **k21**

Edisi : Senin, 23 November 2015

Hal : 7



Alat Rusak, PLTS Gagal Dihibahkan

Total inverter atau pengubah arus yang digunakan 50 unit dan 18 inverter diantaranya senilai Rp 800 juta rusak. Pemkab Karangasem belum bersedia menerima hibah aset itu dari pusat.

AMLAPURA, NusaBali

Karangasem belum juga bisa mengelola sendiri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berlokasi di Banjar/Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu, Karangasem, berkekuatan 1 MG VA untuk tahun 2015 ini. Sebab rencana hibah dari pusat terganjal masalah instalasi mengalami kerusakan di 18 inverter (alat pengubah arus DC ke AC. Padahal sebelumnya, sejak Maret 2013

beroperasi, telah mampu menghasilkan nilai jual Rp 194,39 miliar.

Pemkab Karangasem melalui Bagian Ekonomi Setdakab Karangasem menolak menerima hibah proyek tersebut. Sebab, pusat belum juga melakukan perbaikan di 18 inverter. Kabag Ekonomi I Wayan Sutrisna mengatakan hal itu di Amlapura, Minggu (22/11).

Total inverter yang digunakan, 50 inverter. Kerusakan yang terjadi sejak 6 Juli 2015, 18 inverter senilai Rp 800 juta. Atas terjadinya kerusakan itulah, Pemkab Karangasem belum bersedia menerima hibah aset itu dari pusat. Walau Pemkab Karangasem telah melaporkan atas kerusakan itu, tetapi pusat belum memberikan respons.

"Tetap Pemkab Karangasem belum bersedia menerima hibah bangunan itu, karena masih ada kerusakan di beberapa bagian," jelas Sutrisna.

PLTS itu diresmikan Menteri ESDM Jro Wacik, Senin (25 Februari 2013) telah memproduksi listrik dan langsung konek ke PLN.

Tercatat memproduksi 26.784 MVA atau 26.784 juta VA selama Maret 2013-Oktobre 2015, dengan nilai jual per VA Rp 9, total senilai Rp 241,056 miliar. Hanya saja pemasukan ke PAD, masih nihil. Sebab, aset masih dikuasai pusat, belum diserahkan ke Pemkab Karangasem.

Di Karangasem, tercatat ada 5 PLTS bantuan dari Kementerian ESDM, katanya, 4 PLTS asetnya telah dihibahkan ke Pemkab Karangasem dan telah pula diserahkan ke kelompok pengelola di masyarakat. Empat PLTS itu masing-masing: PLTS berkekuatan 20 KVA terbangun tahun 2014 berlokasi Banjar Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. PLTS 15 KVA tahun 2013 di Banjar Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, PLTS 15 KVA tahun 2013 di Banjar Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu dan PLTS 15 KVA tahun 2013 di Desa Datah, Kecamatan Abang.

"Memang PLTS di Desa Datah mengalami kerusakan satu inverter dari 3 inverter, mesti demikian ma-



• NUSABALI/NANTRA

GAGAL dihibahkan, PLTS yang masih mengalami kerusakan 18 inverter di Banjar/Desa Baturinggih, Kecamatan Kubu.

sih bisa memproduksi," katanya.

Hanya saja, kendala ke depan, setelah empat PLTS dikelola masyarakat, di kemudian hari Pemkab Karangasem kesulitan membantu jika mengalami kerusakan terutama di bagian inverter. Sehubungan berlakunya UU No 23 tahun 2014, hibah hanya bisa untuk lembaga sosial berbadan hukum Indonesia, non profit atau bukan nirlaba.

Sebenarnya kata Sutrisna sangat menguntungkan mengelola PLTS, yang ramah lingkungan tanpa bahan bakar, hanya sesekali melakukan pergantian alat. Sebab, bahan bakunya, sinar matahari, diubah jadi energi listrik. Hanya saja, radius beberapa meter di sekitarnya, suhu udara terasa panas, sebab, lempengan PLTS tersebut menyerap panas. k16

Edisi : Senin, 23 November 2015
Hal : 8



Berkas Tiga Tersangka Undiksha Segera Dilimpahkan

DENPASAR, NusaBali

Tiga tersangka kasus dugaan dugaan mark up lahan untuk Kampus FOK Universitas Ganesha (Undiksha) Singaraja yaitu Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (pemilik tanah) segera dilimpahkan penyidik. Ketiganya menyusul dua tersangka lainnya yang sudah lebih dulu dilimpahkan yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan I Nyoman Mustiara (pemilik tanah).

Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan sebentar lagi penyidik akan merampungkan berkas pemeriksaan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi Undiksha Singaraja yaitu Nengah Nawa, Sugirinata dan Komang Indra. "Sekarang masih tahap persiapan untuk pelimpahan tahap dua," jelas Ashari saat dihubungi Minggu (22/11).

Setelah nantinya rampung akan dilakukan pelimpahan tahap II yaitu barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar yang akan melanjutkan pelimpahan ke PN Denpasar untuk nantinya disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sementara untuk dua tersangka sebelumnya yang lebih dulu dilimpahkan yaitu Suarsa dan Mustiara tinggal menunggu sidang. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tinggal menyusun surat dakwaan sebelum melangkah ke proses sidang. "Setelah surat dakwaan selesai, langsung sidang," lanjut Ashari.

Seperti diketahui, dalam aksinya kelima tersangka melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Bali, Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan sudah memeriksa puluhan saksi termasuk pejabat Undiksha. Di antaranya Rektor Undiksha, Dr I Nyoman Jampel, mantan Rektor, Prof I Nyoman Sudiana dan Prof I Ketut Seken. Selain itu, dua guru besar Undiksha, Prof Raid dan Prof Suma juga telah diperiksa sebagai saksi. rez

Edisi : Senin, 23 November 2015

Hal : 4



Lima Sektor Tanpa DAK, 120 Subak Terancam

AMLAPURA, NusaBali

Tercatat sedikitnya lima sektor pembangunan, di Karangasem tahun depan berjalan tanpa kucuran DAK (Dana Alokasi Khusus). Misalnya bidang pertanian dalam arti luas tanpa DAK, akibatnya 120 terancam mandeg aktivitasnya. Di samping itu 40 tenaga penyuluh, kegiatannya berkurang drastis. Swasembada pangan juga terancam tak tercapai, sebaliknya krisis pangan mulai membayang.

Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem I Nyoman Mertha Tanaya mengaku prihatin atas kenyataan itu. Di samping tanpa DAK, juga tanpa dana hibah untuk bantuan bibit kelompok tani. Kepada NusaBali, Mertha Tanaya memaparkan hal itu, di Amlapura, Minggu (22/11).

Tercatat tahun 2015, ada dana hibah berasal dari DAK Rp 1,5 miliar, tahun 2016, tanpa DAK. Sehingga tidak lagi ada bantuan bibit dari Pemkab Karangasem, tidak ada lagi pemberdayaan 131 subak di tujuh kecamatan, 40 petugas penyuluh terbatas melakukan pembinaan. "Program nanti hanya sebatas membuat membangun demplot (demonstrasi plot) yang merupakan metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan seluas 10 are. Juga menggelar demfarm (demonstrasi farming) dengan memberikan contoh nyata cara bercocok tanah, di hadapan petani nantinya menggunakan 25 hektare," katanya.

Selebihnya petani tidak dapat bantuan bibit dan pupuk dari APBD Karangasem 2016. Padahal subak tersebar di tujuh kecamatan: Kecamatan Rendang 14 subak, Kecamatan Selat 14 subak, Kecamatan Sidemen 13 subak, Kecamatan Manggis 13 subak, Kecamatan Bebandem, 18 subak, Kecamatan Karangasem 28 subak, dan Kecamatan Abang 20 subak. "Kami sesungguhnya masih trauma menangani hibah bansos, di satu sisi tidak ada hibah merasa aman dari tindak pidana, tetapi prihatin dengan nasib petani," tambahnya.

Apalagi di Dinas PU Karangasem juga tanpa DAK untuk perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan, tanpa DAK di Dinas Perkebunan dan Kehutanan: bidang kehutanan, satu lagi di bidang peternakan.

Sebelumnya DAK untuk perbaikan jalan Rp 10,232 miliar dana pendamping Rp 1,023 miliar total Rp 11,256 miliar. Bidang irigasi sebelumnya sebagian DAK Rp 2,815 miliar dana pendamping Rp 281,58 juta dan total Rp 3,097 miliar. Bidang peternakan DAK Rp 650 juta, pendamping Rp 65 juta total Rp 715 juta, dan bidang kehutanan DAK Rp 300 juta, pendamping Rp 30 juta, total Rp 330 juta.



• NUSABALI/NANTRA
KADIS Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, I Nyoman Mertha Tanaya.

Tetapi Kadis PU I Nyoman Sutirtayasa mengaku telah mengusulkan DAK Rp 92 miliar. "Sudah saya usulkan, melalui Bappeda," kata Sutirtayasa.

Kenyataannya di draf R-APBD 2016, banyak sektor tanpa DAK termasuk di bidang pendidikan terutama SMP, SMA, SMK dan MA.

DAK 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem hanya untuk perbaikan sarana dan prasarana SD, sebesar Rp 5,325 miliar, dengan rincian DAK Rp 4,81 miliar ditambah dana pendamping dari APBD Kabupaten Karangasem Rp 484,148 juta total Rp 5,325 miliar.

Nominal itu jauh menurun di bandingkan tahun 2015 dengan Rp 12,17 miliar, rincian DAK dari pusat Rp 11,064 miliar ditambah dana pendamping Rp 1,106 miliar.

SMP, SMA dan SMK alokasi DAK Rp 0. Padahal tahun 2015 untuk SMP DAK Rp 4,88 miliar, pendamping Rp 488,226 juta total Rp 5,37 miliar. Untuk SMA DAK Rp 2,61 miliar, dana pendamping Rp 261 juta dan total Rp 2,87 miliar, serta SMK DAK Rp 3,336 miliar dana pendamping Rp 322,86 juta total Rp 3,551 miliar. **k16**



Solusi Krisis Air

★ Digelontor Rp 60 M,

Pasok Tiga Kecamatan Buleleng Timur

Pengerjaan fisik sumber mata Air Sanih sudah mulai Juli lalu dan air dam akan memasok kebutuhan air bersih bagi warga di enam desa di wilayah Buleleng Timur.



• NUSABALI/SUDIRTA

SINGARAJA, NusaBali

Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari mata air di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan sudah mulai dilaksanakan. Nantinya, sumber mata Air Sanih itu akan memasok kebutuhan air bersih bagi warga di enam desa di wilayah Buleleng Timur.

Enam desa itu meliputi, tiga desa di Kecamatan Kubutambahan yakni Desa Bukti, Bulian dan Desa Kubutambahan, ke-

TAHAP pemasangan jaringan pipa transmisi untuk atasi krisis air bersih di enam desa rawan kesulitan air bersih.

mulian dua desa di Kecamatan Tejakula yakni Desa Bondalem dan Tejakula, dan satu desa lagi di Kecamatan Sawan yakni Desa Bungkulan. Enam desa ini kerap kesulitan air bersih tiap tahunnya pada musim kemarau.

Pemanfaatan sumber air bersih di mata Air Sanih tersebut menggunakan dana APBN yang diperkirakan mencapai

Rp 60 miliar lebih. Pengerjaan fisik sudah dimulai sejak bulan Juli 2015 lalu, dengan total anggaran mencapai Rp 42 miliar lebih. "Ini proyek pusat yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai-Bali Penida (BWS-BP), ini proyek berkelanjutan," terang Dirut PDAM Buleleng, I Made Lestariana yang dikonfirmasi Minggu (22/11).

Edisi : Senin, 23 November 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

Lestariana menjelaskan, debit Air Sanih yang dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air di enam desa tersebut sekitar 125 liter perdetik. Air tersebut akan ditampung pada bak penampungan induk (Reservoir) yang dibangun di Desa Bulian - pada ketinggian 120 meter dari permukaan laut. Reservoir itu memiliki daya tampung 2100 meterkubik. Air dari sumber air Sanih yang dipasok menuju bak penampungan induk di Desa Bulian memakai system pompa listrik.

"Dari reservoir di Desa Bulian itu, air kemudian dipasok secara gravitasi menuju bak-bak penampungan yang dibangun di enam desa tersebut. Dari bak-bak di masing-masing desa itu, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing rumah tangga," jelasnya.

Saat ini pembangunan tahap pertama adalah pemasangan jaringan pipa transmisi dengan total panjang 24 kilometer, dari sumber mata Air Sanih menuju bak penampungan induk, kemudian dari penam-

pungan induk menuju bak-bak penampungan di masing-masing desa.

Disamping itu, bak penampungan induk juga sudah dibangun, termasuk pembangunan bak penampungan di empat desa yakni Desa Bulian, Bukti, Kubutambahan, dan Bondalem. "Untuk bak penampungan di Desa Kubutambahan dan Desa Bungkulan, tahun ini belum bisa dikerjakan. Tetapi bak itu akan dibangun di tahun 2016 nanti," terang Lestariana.

Menurut Lestariana, jika seluruh tahap pekerjaan selesai, air yang dipasok dari mata Air Sanih itu mampu melayani kebutuhan air bersih bagi 10 ribu sambungan rumah tangga. Hanya saja, saat ini Lestariana mengaku pengelolaan air bersih tersebut belum ada kepastian. "Kami belum berani memastikan, apakah distribusi air itu akan diserahkan pada kita (PDAM,red) atau siapa. Kita sifatnya hanya menunggu, dan ikut mendampingi dalam sosialisasi pekerjaan tersebut," ucap mantan Dirut Yeh Buleleng ini. **k19**



Terbentur Anggaran, Pemasangan CCTV di Objek Wisata Batal

MANGUPURA, NusaBali

Wacana pemasangan closed circuit television (CCTV) di sejumlah objek pariwisata batal terlaksana. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Badung, mengakui telah mengajukan anggaran atas rencana pemasangan CCTV, tetapi 'mental' lantaran tak mendapat persetujuan tim anggaran pemerintah daerah.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Badung Wayan Weda Dharmaja, saat dikonfirmasi tak menampik batalnya program pemasangan CCTV. "Kami sudah mengajukannya ke tim anggaran. Namun belum mendapat persetujuan. Mungkin tahun 2017 rancangan tersebut baru dapat terealisasi," kata Weda Dharmaja, Minggu (22/11).

Dalam RAPBD Badung 2016, program Dishubkominfo yang disetujui adalah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan (LPJ) pada tempat-tempat strategis, dengan total anggaran Rp 1,8 miliar. Kemudian rehabilitasi atau pemeliharaan LPJ di sejumlah titik jalan protokol, dengan nilai anggaran Rp 1,9 miliar. Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor sebesar Rp 510 juta lebih. Pemeliharaan traffic light dan warning light, dengan anggaran sebesar Rp 212 juta lebih.

"Tahun 2016 program prioritas ada 19. Kami berharap program-program yang kami canangkan ini dapat berjalan maksimal," harap pejabat asal Sembung, Mengwi, itu.

Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Badung Agus Aryawan, secara terpisah mengatakan tak tahu menahu terkait pembatalan program pemasangan CCTV. Ia beralih ada bagian yang mengurus soal kegiatan fisik. "Yang menangani persoa-

lan tersebut adalah Bidang Fisik, maaf saya belum tahu data pastinya," katanya pada wartawan.

Tarik ulur pemasangan CCTV sempat menjadi sorotan anggota dewan. Anggota DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, mempertanyakan rancangan pemasangan CCTV di Kabupaten Badung. Politisi asal Kuta itu mencontohkan, pariwisata Kuta cukup rawan dengan masalah kriminalitas. Nah, dengan pemasangan CCTV ini paling tidak membantu mengawasi lingkungan.

"Dulu kami sempat mengusulkan agar pemerintah segera memasang CCTV di Kuta, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Sejuhu mana sudah program ini berjalan. Kami berharap hal ini tidak hanya wacana saja," ucapnya.

Terkait rencana pemasangan CCTV, Pemkab Badung awal 2015 sudah mengundang pihak konsultan untuk

program pemasangan CCTV. Dari hasil kajian konsultan saat itu, ada sekitar 315 kamera yang akan dipasang di sejumlah titik seperti pasar, terminal, pertigaan dan perempatan, beberapa titik jalan, kantor camat /luhrah, dan lokasi objek wisata.

Bahkan saat itu, pihak konsultan sudah merinci keperluan kamera untuk titik tertentu. Sementara ada tiga jenis yang diperlukan. Yakni jenis PTZ, kamera jenis ini untuk lokasi yang memerlukan kamera yang dapat digerakkan kanan kiri, atas bawah, serta memperbesar/kecil. Berikutnya jenis fix camera, yakni kamera untuk lokasi yang membutuhkan pengawasan pada satu arah saja dengan sudut converge tertentu. Dan yang terakhir chromatic camera, untuk lokasi yang membutuhkan kamera pengawasan pada satu arah saja dengan sudut converge 360 derajat untuk persimpangan yang sempit. **asa**

Edisi : Senin, 23 November 2015

Hal : 2